**HERMAN NICOLAS VETNJE SUMUAL : STUDI TENTANG KETERLIBATANNYA
DALAM PERMESTA (1957 - 1961)**

Nur Alfi Laila Badru¹, Mustari Bosra², Ahmadin³
Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar
Email: Nuralfhy26@gmail.com

Abstrak

Herman Nicolas Ventje Sumual dibesarkan oleh keluarga yang menjunjung tinggi nilai kekeluargaan. Jiwa pemimpin dan prestasi yang dimiliki Ventje mempermudah dalam menyelesaikan pendidikannya dan hal tersebut menjadi penunjang keberhasilan dalam dunia organisasi. Riwayat organisasi dalam dunia keamanan dan pertahanan memberikan kemudahan dalam menjalani karir militernya hingga mendirikan Permesta. Terjadinya berbagai ketimpangan di berbagai daerah menjadi tujuan utama Permesta untuk memperbaiki keadaan tersebut. Permesta berakhir dengan tindak penyerahan diri terhadap Pemerintah pusat. Penelitian ini menggunakan metodologi sejarah dengan tahap yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik (verifikasi), interpretasi (penafsiran) dan historiografi (penulisan sejarah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga Herman Nicolas Ventje Sumual memperoleh faktor terpenting yang menunjang keberhasilan pendidikan hingga karir militernya. Awal berdirinya Permesta lahir dari tindakan penentangan terhadap rezim Sukarno yang anti demokrasi oleh para politisi hingga para intelektual di kalangan militer dan ingin memperbaiki kembali pembangunan daerah yang terbengkalai serta kesejahteraan rakyat. Ventje memegang posisi penting dalam Permesta sebagai proklamator Piagam Perjuangan Permesta dan dijadikan sebagai ikon Permesta.

Kata Kunci: Herman Nicolas Ventje Sumual, Permesta, Proklamasi Permesta

Abstract

Herman Nicolas Ventje Sumual was raised by a family that upheld the value of kinship. Ventje's leadership and achievements make it easier to complete his education and that supports success in the organization. The organization's history in the world of security and defense made it easier to pursue his military career until founding Permesta. The on many of inequality in various regions became permesta's main goal to improve the situation. Permesta ended with a surrender to the central government. This research uses historical methodology with stages namely heuristics (data collection), criticism (verification), interpretation (interpretation) and historiography (historical writing). The results showed that Herman Nicolas Ventje Sumual's family had the most important factors that supported his educational success to his military career. The beginning of Permesta was born out of opposition to sukarno's anti-democracy regime by politicians to intellectuals in military circles and wanted to improve the rebuilding of abandoned areas and the welfare of the people. Ventje held an important position in Permesta as a proclamation of the Permesta Struggle Charter and became an icon of Permesta.

Keywords: Herman Nicolas Ventje Sumual, Permesta, Permesta Proclamation

A. Pendahuluan

Terjadinya suatu peristiwa tidak lepas dari hal-hal yang sebelumnya telah terjadi, seperti yang diketahui bahwa dalam disiplin ilmu sejarah berlaku hukum kausalitas atau sebab-akibat. Pergolakan Permesta pada abad ke-XX merupakan pergolakan yang sangat besar pengaruhnya dalam membawa dampak perubahan diberbagai bidang (Husain, 2014). Herman Nicolas Ventje Sumual seorang perwira militer yang berasal dari unsur kelaskaran dan menjadi ikon Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Beliau yang memproklamkan Piagam Perjuangan Permesta pada 2 Maret 1957.

Herman Nicolas Ventje Sumual memiliki nama panggilan Ventje semasa kecilnya dan populer di kalangan kawan-kawan dekatnya. Ia merupakan anak dari Emma Mogot dan dan Willem Sumual, ia lahir pada 11 Juni 1923 di Romboken, Pantai Danau Tondano Minahasa. Ia bersaudara tujuh orang yang dibesarkan oleh Ayah yang merupakan Sersan KNIL (Serdadu Belanda) (Sadi & dkk, 2007). Herman Nicolas Ventje Sumual adalah seorang perwira militer yang berasal dari unsur kelaskaran dan menjadi ikon Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta). Beliau yang memproklamkan Piagam Perjuangan Permesta pada 2 Maret 1957. Permesta yang merupakan reaksi terhadap sentralisasi pemerintah pusat di Jakarta (Salim, 1971).

Dua tokoh penting dalam melahirkan gerakan pembangunan semesta Indonesia Timur yakni Letkol Herman Nicolas Ventje Sumual dan Letkol Muhammad Saleh Lahade. Aditjondro, G. J. (2006). Diantara keduanya Saleh Lahade yang paling lama dan kontinu berada di Sulawesi, ia memegang berbagai jabatan tinggi dalam staf pimpinan Wirabuana. Permesta berakhir pada tahun 1961 yang ditandai dengan tindak penyerahan diri Ventje terhadap Pemerintah Pusat dan dipenjarakan di Jakarta. setelah keluar dari

penjara, Ventje menjalani hari-harinya dengan berbagai kegiatan sebelum menghembuskan nafas terakhirnya diusia 86 tahun pada 28 Maret 2010 (Leirissa, 1997).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode sejarah (Kartodirdjo, 1992), metode sejarah memiliki tahapan kerja, yaitu: *Heuristik*, tahap ini merupakan tahap awal dalam penelitian dengan cara mengumpulkan dan menghimpun data sebanyak mungkin yang ada hubungannya dengan obyek yang diteliti. *Kritik Sumber atau Penilaian Bahan*, setelah data terkumpul maka penulis menilai atau mengkritik sumber yang telah diperoleh baik berupa kritik ekstern maupun intern terhadap data yang berhasil dihimpun dalam *Interpretasi atau Penafsiran*, setelah diadakan kritik maka diadakan pengumpulan data. Interpretasi atau penafsiran terhadap data sejarah yang diperoleh dalam bentuk penjelasan terhadap fakta seobjektif mungkin. *Histonografi atau Penulisan Sejarah*, tahap ini merupakan tahap akhir dalam metode penulisan sejarah. Dalam tahap ini semua data yang telah terseleksi (fakta) dapat disusun kembali menjadi satu.

C. Tinjauan Penelitian

Pada 2 Maret 1957 merupakan awal berdirinya suatu gerakan melawan ketimpangan yang terjadi di Indonesia Timur pada Era Presiden Sukarno, gerakan tersebut ialah Permesta. Permesta diproklamasikan oleh Herman Nicolas Ventje Sumual dan Piagam Permesta dibacakan oleh M. Saleh Lahade di Makassar. Namun pada 10 Juni 1957 markas Permesta dipindahkan ke Kinilow, Sulawesi Utara. Permesta kemudian berakhir pada 20 Oktober 1961 (Sumual, 2011). Penelitian ini terfokus pada daerah Sulawesi Utara karena merupakan wilayah pusat dari Permesta.

D. Pembahasan

1. Latar Belakang Kehidupan Herman Nicolas Ventje Sumual

a. Keluarga

Ventje akrab disapa Ventje lahir pada 11 Juni 1923 di Romboken, Minahasa, Sulawesi Utara. Ia merupakan anak dari Emma Mogot dan Willem Ventje, ayahnya bekerja sebagai guru sekolah dasar di Desanya. Ventje anak ke 2 dari tujuh bersaudara yang terdiri dari Retty, Jean, Rose, Evert, Maurits, Anie, dan memiliki saudara tiri yakni Olva. Agama yang dianutnya yakni Kristen Protestan, ia memiliki karakter tak banyak bicara, kekerabatan kuat, percaya diri, berwibawa dan berjiwa pemimpin (Nissiel & Natalia, 2015).

Pada 1941 ibunya meninggal dunia yang membuat dirinya berpikir untuk mencari pekerjaan saja atau sekolah dengan ikatan dinas. Berselang beberapa bulan ditengah pencarian pekerjaan ataupun sekolah ikatan dinas, tentara Jepang masuk daerah Minahasa dan melangsungkan berbagai serangannya. Hal tersebut membuat gerakan Ventje menjadi terbatas sehingga ia tak bisa berbuat apa-apa lagi (Harvey, 1989).

Ventje memutuskan untuk menikah diusianya yang baru menginjak 19 tahun. Ia menikah dengan Sientje Pangemanan pada Mei 1942 dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Vera. Namun pernikahannya tersebut tak bertahan lama, ia berpisah setelah masuk sekolah pelayaran di Makassar pada 1943. Menikah untuk kedua kalinya dengan Henny Lie pondaag, namun pernikahannya pun tidak bertahan lama karena ia bercerai pada 1961 dan akhirnya menemukan Josephine Hetty Warouw yang menemaninya hingga akhir hidupnya. Ventje meninggal pada 28 Maret 2010 saat tengah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit Jakarta karena penyakit jantung dan pengaruh usia yang telah menginjak 86 Tahun (Sumual, 2011).

b. Pendidikan

Ventje menempuh pendidikan sekolah dasar di Zendinggenootschap pada 1931 yang merupakan tempat mengajar ayahnya. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat dasar pada 1938, Ventje melanjutkan pendidikan di MULO (Meer Uitgebreid Lagere Onderwijs) Tomohon pada tahun yang sama. Pada 1941, ia telah menyelesaikan pendidikannya di MULO. Kemudian ia ikut pada sekolah kemahiran khusus dalam lingkungan Marinir Hindia-Belanda (Sumual, 2011).

Pada tahun 1945, Sumual sedang berada di Jakarta dan tinggal dalam waktu yang cukup lama. Pemuda-pemuda sering berkunjung ke rumah Nyong Mamusung, rumah yang ditumpanginya dan sering membahas topik-topik serius seperti revolusi kemerdekaan, nasionalisme Indonesia dan lain-lain. Notji Kindangen dan Empie Kanter yang sering berdiskusi bersama Ventje membahas tentang anti-fasisme Jepang. Hingga kawan lainnya datang yang bernama Tompunu dan memperkenalkan tempat belajar politik di daerah Gunung Sahari untuk pemuda-pemuda Indonesia yang sekaligus memiliki tempat tinggal dengan berbagai fasilitas. Tempat belajar tersebut dikenal dengan sebutan Asrama Kader Indonesia Merdeka, Ventje beserta teman lainnya pun bergabung ke dalamnya (Sumual, 2011).

Asrama Kader Indonesia Merdeka merupakan ide dari Laksamana Muda Tadashi Maeda selaku kepala Bunkafu Kaigun pada 1944 yang ingin mendirikan sekolah untuk mendidik para kaum muda pengisi kemerdekaan Indonesia. Penamaan Asrama Kader Indonesia Merdeka atas saran dari Ahmad Soebardjo, asrama ini dibawah pengawasan Yoshizumi dan Shigetada nishijima. Proklamasi kemerdekaan sudah mulai dibicarakan oleh banyak orang sejak 15 Agustus 1945 dan terdengar bahwa proklamasi Indonesia merdeka akan diumumkan segera. Hingga 16 Agustus 1945 menjelang malam, Ventje

dan pemuda lainnya diberi intruksi untuk berkumpul oleh Wikana melalui Evert Langkai dan diminta untuk menjaga keamanan di wilayah sentral Jakarta, sementara pada malam hari mengadakan rapat perumusan proklamasi. Sejak proklamasi kemerdekaan, para pengajar dalam Asrama Indonesia Merdeka mulai sibuk dalam pemerintahan dan lembaga-lembaga negara baru. Ventje dan Empie Kanter mulai mengunjungi salah satu tokoh pengajar yakni Mr. Sunario dan istrinya yang berasal dari daerah yang sama dengan Ventje yakni Minahasa yang membuat hubungan mereka jadi lebih akrab. Mr. Sunario mengajak mereka ke Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) untuk dihadapkan ketua KNIP Mr. Kasman Singodimedjo dan mendaftarkannya jadi anggota (Sulsel.co, 2016).

KNIP sebagai Badan Pembantu Presiden yang beranggotakan pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai kalangan dan daerah, salah satunya para mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Terbentuknya KNIP berdasarkan pada Pasal IV UUD 1945 tentang aturan peralihan pada 29 Agustus 1945 dan berakhir pada 15 Februari 1950. Pada 16-17 Oktober 1945 saat sidang KNIP di salah satu gedung Kramat Jaya, dilakukan pergantian pimpinan dengan anggapan bahwa pimpinan yang ada sudah tidak layak lagi dengan sistem pemerintahan yang berbeda. Lalu ditunjuklah Sutan Sjahrir sebagai ketua dan Mr. Amir Sjarifuddin sebagai wakil ketua. Kemudian terjadi banyak perubahan baik dalam KNIP maupun sistem politik dan ketatanegaraan (Saladin, 2020).

Pada 8 Oktober 1945, terbentuk KRIS (Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi) yang mana Ventje juga ikut serta ke dalamnya. Tepat peringatan 1 tahun KRIS, dilakukan pemilihan pengurus baru. Ventje memegang jabatan sebagai Kepala Seksi Pertahanan dan di dalam struktur komando Laskar KRIS menjabat Staf

Intelijen & Operasi. Ventje melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Jogja pada Universitas Gajah Mada, Fakultas Hukum. Kemudian Ventje mengikuti Sekolah Staf & Komando Angkatan Darat (SSKAD) di Cilitan yang diselenggarakan oleh MBAD. Ia menjadi ketua kelas sekaligus wakil ketua senat (Harvey, 1989).

c. Karir Militer

Pada 5 Oktober 1945 merupakan awal pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), kemudian pada 1 Januari 1946 TKR diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat untuk selanjutnya pada 25 Januari 1946 diubah lagi menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pihak laskar KRIS berupaya membereskan masalah internalnya dan melakukan upaya-upaya pendekatan pada Markas Besar TRI dan Kementerian Pertahanan. Pada kementerian pertahanan ini, ada Biro Pertahanan dan Ventje diberi kepercayaan untuk memegang urusan integrasi tersebut sebagai Kepala Seksi Pertahanan KRIS dan Staf Komando Laskar KRIS oleh pucuk pimpinan KRIS dan Laskar KRIS (Sadi & dkk, 2007).

Laskar KRIS diintegrasikan ke dalam TRI secara menyeluruh menjadi satu kesatuan dan sebagai salah satu brigade dalam TRI, brigade XII pada November 1946. Ventje sebagai Staf Intelijen & Operasi pada Divisi 17 Agustus. Namun sebelum diresmikan pada HUT RI 1947, akhir Juli 1947 terjadi Agresi Militer Belanda yang menyebabkan peresmian Divisi tersebut batal dan semua organisasi pasukan TRI harus direorganisasi. Tak lama setelah batalnya rencana Divisi 17 Agustus, Ventje diangkat sebagai Kepala Staf Brigade XII dengan pangkat Mayor. Akhir 1947 proses rekonstruksi dan rasionalisasi dipertegas, TNI di Jawa terdiri 3 divisi dan 1 kesatuan mobile. Kesatuan mobile terdiri 4 satuan besar, yakni KRU-W, KRU-X, KRU-Y, dan KRU-Z, Ventje menjadi Kepala Staf pada KRU-X (ex Brigade XII) (Sumual, 2011).

Pada 2 Januari 1948 dikeluarkan keputusan Presiden No.1 Tahun 1948 yakni memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran, namun keputusan ini menuai banyak reaksi penolakan oleh kalangan Angkatan Perang sehingga dikeluarkanlah penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 tentang pembatalan penetapan yang lama. Penataan tersebut baru selesai pada akhir tahun 1948 (Nasution, 1968).

Bulan-bulan akhir 1948 TNI di Jawa kembali direorganisasi dan selesai di akhir Oktober 1948. Hasilnya mengeluarkan 4 divisi territorial yang membawahi 15 brigade dan 2 brigade lagi yakni brigade XVI dan XVII di bawah Panglima Komando Teritorium Jawa, Nasution. KRU-X berada pada brigade XVI dan Ventje masih sebagai Kepala Staf. Awal Desember 1948, struktur kepemimpinan Brigade XVI diperbarui guna meningkatkan persiapan menghadapi serangan besar dari musuh dan mempertinggi kesiagaan pasukan dengan menonjolkan batalyon-batalyon. Ventje sebagai Komandan Depo Batalyon dan saat terjadi Agresi Belanda II Ventje diangkat jadi komandan gerilya sektor barat oleh Letkol Sukanda Bratamanggala/perwira dari MBKD saat sedang melangsungkan gerilyanya di bagian barat Jogja (Sumual, 2011).

Agresi Militer Belanda II diawali dengan diserangnya lapangan terbang Maguwo dan bangunan penting yang ada di Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Serangan keduanya ini ingin menunjukkan terhadap dunia bahwa pemerintah Republik Indonesia dan TNI secara *de facto* tidak ada lagi (Triani, 2014). Kelanjutan dari berhasilnya serangan umum 1 Maret 1949 membuat TNI menjalankan sistem pendidikan yang sebelumnya dikenal Akademi Militer. Adolf Lembong sebagai kepala Pendidikan AD dan Ventje sebagai Wakil Kepala Bagian Pendidikan. Target perjuangan RI

setelah agresi militer Belanda yakni menghilangkan segala hal yang berbau kolonialisme di Indonesia Timur. Ketika terdengar kabar bahwa terjadi pemberontakan tentara KNIL di Bandung dan menewaskan Adolf Lembong, maka hal tersebut membuat Ventje harus segera kembali Indonesia Timur yang kemungkinan akan terjadi lebih besar. Semua pekerjaan Ventje maupun Adolf Lembong diambil alih oleh Djatikusumo dan Suryosurarlo (Sumual, 2011).

Pemberontakan tentara KNIL di Makassar terjadi pada 5 April 1950 yang dipimpin Andi Azis. Pasukan Andi Azis menyerbu tempat-tempat vital dan menahan Panglima Teritorium Indonesia timur. Aksinya ini lahir dari tekad yang ingin mempertahankan keberadaan Negara Indonesia Timur (NIT) yang hendak kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ventje pun kembali ke Sulawesi Utara, saat itu ia sebagai Ketua Komisi Militer Sub-Teritorium Sulawesi Utara dan Tengah. Tugas tersebut merupakan pengambil alihan untuk kekuasaan militer di wilayah Indonesia Timur. Di Sulawesi Utara ia membentuk pasukan gerilya dari hasil konsolidasi untuk APRIS yang diresmikan oleh Letkol Joop Warouw. Dalam struktur komando wilayah Indonesia Timur, Ventje memegang posisi sebagai Staf Teritorial Kompas-B/Kopas SUMU dan saat itu ia tetap sebagai Kepala Pemerintahan Militer (Rusiana, 2020).

Pada 1950 ini terbentuk Komando Daerah Militer atau Kodam VII/Wirabuana yaitu Kodam yang dibentuk atas likuidasi dari Kodam XIII/Merdeka dan Kodam XIV/Hasanuddin. Kemudian dengan Surat Penetapan Menteri Pertahanan nomor 12/MP/1950 6 Januari 1950 pemerintah membentuk sebelas wilayah komando teritorium di Indonesia. Penjabaran dari surat tersebut, Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan surat penetapan nomor 83/KSAD/PNT/1950 20

Juni 1950 tentang pembagian wilayah Indonesia Timur dengan nama Komando Tentara Teritorial VII (Sadi & dkk, 2007).

Pada 20 Juni 1950 dijadikan sebagai hari ulang tahun Kodam VII/Wirabuana. Panglima waktu itu dipegang oleh kolonel A.E. Kawilarang dengan wilayah meliputi Bone, Manado, Denpasar, Ambon, dan Makassar yang bertugas utama menumpas Republik Maluku Selatan (RMS) yang didirikan oleh Dr. Soumokil pada 24 April 1950. Dalam menghadapi berbagai ancaman pemberontakan bersenjata di Indonesia Timur pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya, pemerintah dan TNI menerapkan konsep pertahanan negara yang bersifat kewilayahan terintegrasi. Hal itu diwujudkan dengan membentuk institusi militer. Pada tanggal 20 Juni 1950 dibentuk tujuh Teritorial di seluruh Indonesia. Teritorial VII berkedudukan di Makassar di bawah Panglima Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta. Teritorial VII ini kemudian bernama Teritorial VII/Indonesia Timur yang membawahi wilayah Sulawesi dan Maluku (Hasanuddin, 2016).

TNI terus melakukan konsolidasi organisasi militer. Wilayah teritorial TT-VII/IT kemudian diperluas dengan mencakup Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Bali, Maluku, dan Irian Barat. Pada bulan September 1950, TT-VII/IT mengalami reorganisasi dengan pembentukan empat Kompas. Dalam perkembangan selanjutnya, melalui Surat Keputusan Panglima TT-VII/IT Nomor 80042/7/VII/1952, pada tanggal 5 Juli 1952, menetapkan bahwa empat Kompas dalam tubuh TT-VII/IT diubah menjadi Resimen Infanteri. Adapun Panglima yang pernah memimpin TT-VII/IT adalah:

1. Kolonel Inf A.E. Kawilarang (1950-1951),
2. Letkol Inf A. Kosasih (1951),
3. Letkol Inf Gatot Subroto (1951-1952),

4. Letkol Inf J.F. Warouw (1952-1954), dan
5. Letkol Inf H.N. Ventje (1954-1957).

Pembentukan Kodam di Indonesia Timur bermula ketika TNI merumuskan konsep baru dalam upaya pemulihan keamanan di daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara pada tahun 1956. Akhirnya dibentuklah Komando Daerah Pertempuran Sulawesi Selatan dan Tenggara (Komando DPSST). Institusi itu kemudian berubah nama menjadi Komando Daerah Pengamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara. Setelah Komando DPSST terbentuk, wewenang militer di Sulawesi Selatan dan Tenggara dialihkan dari Panglima Komando TT-VII/Wirabuana ke Panglima Komando DPSST sebagai penguasa militer (SB, 2017).

2. Latar Belakang Keterlibatan Herman Nicolas Ventje Sumual Memproklamasikan Permesta

a. Kondisi Teritorial VII Wirabuana jelang Proklamasi Permesta

Politik di Indonesia sudah ada sebelum masa kolonial. Seiring dengan perkembangan politik, terjadi berbagai konflik dalam dunia perpolitikan di Indonesia, termasuk pada masa Presiden Sukarno. Ditengah kondisi politik yang sedang memanas, pada 13 Agustus 1956 Kawilarang melakukan penangkapan terhadap Menteri Ruslan Abdulgani yang merupakan politisi andalan Sukarno-Ali. Hal tersebut bukan suatu awal yang berdiri sendiri melainkan keberlanjutan dari konflik politik yang telah lama terjadi. Penangkapan tersebut bukan tanpa alasan, ia dituding telah melakukan tindak pidana korupsi. Saat penangkapannya, ia sedang bersiap ke London untuk menghadiri undangan sebuah konferensi internasional. Tidak tinggal diam, Nasution membebaskannya dengan alasan penangkapan tersebut harusnya dengan prosedur khusus karena seorang menteri.

Hal tersebut tentunya tidak disenangi pihak penentang karena dianggap melindungi kejahatan dan banyak yang berpihak kepada Kawilarang termasuk Panglima Indonesia Timur Kolonel Joop Warouw (Sumual, 2011).

Konflik politik yang semakin memuncak membuat Nasution dan Gatot Subroto mengangkat Ventje menjadi Panglima Indonesia Timur menggantikan Warouw. Salah satu tokoh penting dalam menentang Nasution yakni Simbolon yang penentangannya sebagai pokok krisis daerah. Terjadi penentangan terhadap rezim Sukarno-Ali-Nasution dari para politisi, para intelektual di kalangan militer, hingga Ventje sendiri. Ventje memutuskan menentang rezim Sukarno-Ali-Nasution yang anti demokrasi itu agar dapat memperbaiki pembangunan daerah yang terbengkalai serta kesejahteraan para prajurit (Harvey, 1989).

Pembangunan tetap terabaikan dengan percaturan politik yang menjadi permainan kepentingan politisi, kemiskinan makin meluas, serta hadirnya PKI dalam pusat kekuasaan. Hingga pada Februari 1957 Sukarno mengumumkan suatu konsepsi masalah yang terlihat merupakan tatanegara baru yang bertentangan dengan konstitusi. Pergerakan Sukarno tak lepas dari dukungan PNI dan PKI, padahal adanya PKI dalam pusat kekuasaan sudah menjadi masalah tersendiri bagi warga Indonesia umumnya. Posisi rezim dengan pimpinan politik dan militer hanya menjauhkan bangsa dari pembangunan kesejahteraan rakyat (Sumual, 2011).

Usaha penekanan terhadap pemerintah dari pihak kemiliteran sama dengan tindakan dari pengecam sipil atas demokrasi liberal, pengecam yang menonjol yakni Sukarno dan Muhammad Hatta. Seiring dengan perkembangan kondisi, upaya menghidupkan kembali tradisi Indonesia pada perundingan dan permufakatan mengakibatkan perbedaan pemikiran dan harapan. Perbedaan yang

mendasari antara dwitunggal pemimpin Indonesia tersebut diantaranya pandangan, masalah, dan gaya. Perbedaan yang memicu pecahnya kesatuan dwitunggal tersebut, Muhammad Hatta menyatakan pengunduran dirinya pada 1 Desember 1956 (Harvey, 1989).

Sejak 1954 Panglima teritorium Indonesia Timur Joopy Warouw memberi keluasaan bagi perdagangan hasil pertanian di daerah agar pemasukan lebih besar. Pada 1956 tuntutan pembangunan semakin keras, berbagai kalangan menyusun konsepsi pembangunan hingga lahirnya Rencana Pembangunan Lima Tahun Indonesia Timur yang disusun oleh tokoh nasional Indonesia Timur. Para kaum muda Indonesia Timur mendirikan Dewan Pemuda Sulawesi, lalu Dewan Pemuda Indonesia Timur yang berpusat di Makassar yang beranggota hingga ke Nusa Tenggara dan melangsungkan sejumlah program praktis pembangunan desa-desa (Sumual, 2011).

b. Proklamasi berdirinya Permesta oleh Herman Nicolas Ventje Sumual

Tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi hanya memiliki dua pilihan dan berkembang terutama dikalangan perwira staf Tentara Teritorium (TT) VII/Wirabuana yakni atara tetap membiarkan keadaan berlarut-larut sampai terjadi perpecahan politik ataukah mengambil tindakan penyelamatan terhadap keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Apabila dikalangan perwira staf TT VII Wirabuana mengambil tindakan drastis, mereka menyadari akan meningkatnya sikap antagonisme pemerintah pusat terhadap Indonesia Timur, sementara disisi lain mereka telah berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindakan yang mengarah kepada pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat.

Upaya pencegahan pemutusan hubungan dengan pemerintah pusat rupanya tak bisa cegah, ketidakpuasan yang berkejolak menjadi pemicu utama yang

menimbulkan reaksi protes yang dahsyat terhadap tindakan yang dilakukan pemerintah. Kelanjutan reaksi protes tersebut berlanjut dalam suatu pertemuan yang dilakukan Letkol Saleh Lahade dan Mayor M. Jusuf dengan KSAD Nasution pada Januari 1957 untuk membicarakan lebih lanjut ketidakpuasan dan kondisi Sulawesi Selatan. Pertemuan itu menghasilkan keinginan mengadakan otonomi daerah dan rehabilitasi infrastruktur di Sulawesi Selatan (Sumarkidjo, 2006).

Pada bulan Februari 1957 para Perwira TT VII Wirabuana membentuk suatu panitia yang ditugaskan untuk menyusun suatu rencana kerja menyeluruh yang mencakup asal-usul masyarakat. Menyusul dengan keberangkatan Gubernur Andi Petta Rani ke Jakarta untuk membicarakan dengan pejabat-pejabat pemerintah pusat mengenai beberapa masalah dan tuntutan-tuntutan masyarakat Sulawesi agar diberi status ekonomi dalam tempo satu bulan, disediakannya uang untuk proyek-proyek pembangunan di propinsi, dan diberi prioritas bagi suatu pembagian penghasilan propinsi sebesar 70% dari penghasilan ditahan oleh daerah dan 30% untuk pemerintah pusat. Perdana Menteri Kabinet Ali II telah menerima tuntutan dan menjanjikan untuk mengirim kemudian suatu komisi ke Sulawesi. Namun, hingga kabinet Ali II jatuh pun komisi yang telah dijanjikan tidak dapat terealisasi. Akan hal tersebut, dibentuklah suatu Komite yang terdiri atas sebelas orang yang bertugas membuat rancangan susunan Piagam Permesta (Syamsul, 1999).

Jumat 2 Maret 1957 dini hari di Makassar, Letkol Ventje membacakan naskah proklamasi dalam situasi yang disebutnya *Staat van Oorlog en Beleg (SOB)*, yang artinya “negara dalam keadaan darurat perang”. Proklamasi ini menjadi penanda bahwa permesta adalah suatu gerakan serius. Proklamasi tersebut menyatakan bahwa wilayah Teritorium VII

yang berada dalam keadaan darurat perang. Dalam situasi seperti ini bisa diberlakukan pemerintahan militer sesuai Pasal 128 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1948 (Sumarkidjo, 2006).

Setelah pembacaan Proklamasi Permesta, kemudian dilanjutkan dengan dengan pembacaan Piagam Permesta oleh Letkol M. Saleh Lahade yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan oleh seluruh anggota yang hadir dalam peretemuan itu yakni sebanyak lima puluh satu tanpa adanya sanggahan. Adapun pertemuan tersebut diadakan pada tengah malam karena untuk menghindari suatu pertarungan dengan pasukan Brawijaya dari koDPSST. Pertemuan tersebut diadakan secara tertutup dengan pernyataan Gubernur Andi Pangeran Petta Rani yang menyerukan kepada rakyat untuk melakukan pekerjaannya seperti biasa dan tetap tenang, serta mengikuti peraturan yang berlaku (Syamsul, 1999).

3. PERJUANGAN HERMAN NICOLAS VENTJE SUMUAL DALAM PERMESTA

a. Awal Perjuangan Herman Nicolas Ventje Sumual dalam Permesta

Wilayah Indonesia Timur pada 2 Maret 1957 disebut dalam keadaan darurat perang oleh Ventje dan kawan-kawan lainnya dengan berbagai alasan kuat. Selain mengenai masalah ekonomi, masalah ancaman disintegrasi dari sejumlah daerah di Sulawesi dan Maluku juga menjadi salah satu alasan utamanya. Ventje menyebut, deklarasi Permesta kemudian dikondisikan oleh pemerintah pusat menjadi sebuah ancaman, namun Permesta tetap mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Selanjutnya pemerintah mengambil tindakan dengan digerakkannya operasi militer oleh Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) ke Sulawesi untuk memadamkan Permesta (Salim, 1971).

Pasukan Permesta sempat membuat APRI sangat kewalahan. Ventje bahkan yakin pihaknya akan dapat menduduki Jakarta sebagai pusat pemerintahan RI dengan menganggap Jakarta adalah titik kunci. Di titik inilah Permesta, yang semula cuma pernyataan politik demi menuntut keadilan, mulai mengarah pada aksi yang lebih serius karena berencana merebut Jakarta sebagai pusat kedudukan pemerintah. Hal itu berawal dari tuntutan yang dilontarkan ke pemerintah pusat dijawab dengan bom di Ambon. Para perwira militer di Indonesia Timur juga menghawatirkan pengaruh orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI) yang semakin dekat dengan pemerintahan. Itulah yang menjadi penggerak Permesta untuk mengobarkan perang melawan pemerintah pusat. (Raditya, 2019).

Pada 3 Maret 1957 di Makassar telah dibentuk suatu pemerintahan militer yang ditegakkan dalam keadaan perang sehari setelah Proklamasi Permesta. Dalam konferensi komandan-komandan Teritorial di MBAD Jakarta yang berlangsung 15 - 22 Maret, Mayjen Nasution memberitahukan kepada Letkol Ventje bahwa ia diwajibkan menyerahkan Komando TT VII Wirabuana kepada KSAD, yang dijawab Ventje bahwa jika hal ini terjadi maka akan menimbulkan perang. Pada 27 Mei 1957 keluarlah keputusan dari MBAD yang menyatakan bahwa TT VII Wirabuana dan KoDPSST akan disatukan di bawah komando KSAD, dalam hal ini ia akan kehilangan jabatan sebagai Panglima TT VII Wirabuana yang tentunya menuai protes (Syamsul, 1999).

Pada 8-12 Mei 1957 diadakan Kongres Bhinneka Tunggal Ika sebagai realisasi dari program kerja DPP Permesta yang dihadiri oleh utusan 30 Kabupaten di seluruh Indonesia Timur, wakil-wakil Kotamadya Ujung Pandang serta tokoh-tokoh asal Irian Jaya, para Anggota DPP, wakil-wakil daerah DPR (Jakarta) dan

Dewan *Kons-tituante* (Bandung). Guna merealisasikan keputusan-keputusan dari kongres ini, maka pimpinan tertinggi Permesta Letkol Ventje memindahkan markasnya dari Makassar ke Kinilow pada Juni 1957. Pemindehan markas tersebut karena dengan alasan keamanan dan banyaknya dukungan dari massa, serta sebagian besar pucuk pimpinan Permesta adalah orang-orang yang berasal dari Minahasa (Sikki, 1996).

Salah satu hasil keputusan utama pada Kongres Pemuda Indonesia Timur yakni pembentukan wadah tunggal yang diberi nama Komando Pemuda Permesta (KoP2) dengan beberapa departemen. Departemen Pengarahan Tenaga dan KoP2 diketuai oleh Jan Torar (Leirissa, 1997). Pembangunan yang Permesta rencanakan dapat berjalan dengan baik karena didukung oleh dana yang diperoleh dari hasil perdagangan kopra yang bisa membiayai berbagai proyek pembangunan sampai ke desa-desa (Harvey, 1989).

Hingga 15 Februari 1958, Permesta mulai berada di masa sulit. Bermula dari keputusan rapat yang ambil oleh para anggota TNI di Sulawesi Utara setelah pengumuman dibentuknya Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). PRRI ini dibentuk karena adanya kekecewaan terhadap pemerintah pusat yang tidak memperhatikan pembangunan di daerah dan pelaksanaan pemerintahan yang telah menyimpang dari UUD 1945 dan ada beberapa tokoh Permesta yang terlibat penting dalam PRRI. Keputusan yang diambil yakni untuk memihak kepada rakyat dan mendukung PRRI yang artinya keputusan ini akan melawan pemerintah pusat. Hal itu mendapat sambutan yang meriah dari peserta rapat serta dukungan dari Mayor D.J. Somba sebagai Komando KDM-SUT yang secara resmi mengumumkan pada 17 Februari 1958 bahwa ia memutuskan hubungan dengan Kabinet Juanda (Indonesia, 2008).

Pemerintahpun mengambil tindakan tegas terhadap PRRI dan Permesta dengan memecat perwira yang ikut terlibat dalam gerakan ini hingga melakukan serangan dengan mengadakan pengeboman terhadap daerah kekuasaannya. Azizah, N. (2019).. Hal tersebut membuat sebagian masyarakat semakin mendukung Permesta karena pemerintah pusat melakukan cara kekerasan dalam menghadapi gerakan Permesta dan sebagiannya lagi menarik dukungannya terhadap Permesta karena tidak menginginkan adanya kontak senjata dalam memperjuangkan otonomi daerah yang tidak sesuai dengan tujuan Proklamasi Permesta (Syamsul, 1999).

b. Akhir Perjuangan Herman Nicolas Ventje Sumual dalam Permesta

Gerakan Permesta mendapat dukungan dan bantuan dari sejumlah negara asing, diantaranya Jepang, Filipina, Taiwan, dan Amerika Serikat yang sama-sama anti-komunis. Melalui Amerika Serikat yang memberikan bantuan sejumlah pesawat pengebom dan pesawat tempur, serta mendapat dukungan. Selfi, S., Ridha, R., & Malihu, L. (2020).

Disamping karena alasan untuk melindungi perusahaan-perusahaan minyak dan warga negaranya juga untuk membendung arus komunis yang dinilai oleh Amerika Serikat sudah cukup jauh berpengaruh di Indonesia. Permesta pun melancarkan serangan-serangannya di beberapa daerah yang tentunya semakin mendapat kebencian dari rakyat (Sikki, 1996).

Keberhasilan pasukan-pasukan Permesta tidak berlangsung lama, setelah beberapa pekan hingga 23 Mei 1958 keadaan berbalik dengan kekuasaan Permesta yang dipatahkan oleh serangan-serangan AURI hingga beberapa tokoh Permesta ditangkap pada 20 Mei 1958

diantaranya, M. Saleh Lahade, Mochtar Lintang, Anwar Bey, Bing Tahumahina dan O.E Enggelen. Dengan tertangkapnya tokoh-tokoh Permesta di Makassar dan jatuhnya beberapa daerah kekuasaan serta tertangkapnya pula Allan Pope yang merupakan penerbang Amerika Serikat, sehingga AS mengurangi bantuan terhadap Ventje. Penaklukan daerah-daerah oleh pasukan TNI pun semakin bertambah, namun tidak membuat perlawanan pasukan Permesta padam dan serangannya berubah menjadi serangan gerilya secara kecil-kecilan hingga 17-19 Februari 1959 melancarkan serangan umum terhadap daerah Amurang, Kawangkoang, Langoang, dan Tondano yang menyebabkan pasukan TNI mundur di sepanjang daerah perbatasan dan banyak memakan korban dari kedua belah pihak (Syamsul, 1999).

Pada Mei 1959 keadaan mulai berubah dengan dijadikannya daerah Minahasa sebagai daerah uji coba penggunaan roket oleh pasukan TNI terhadap markas-markas gerilya pasukan Permesta hingga kewalahan menghadapi pasukan TNI. Dengan keadaan persenjataan yang canggih, pasukan TNI berhasil menguasai Kotamobagu pada 18 September 1959. Dikuasainya Kotamobagu oleh pasukan TNI menjadi guncangan bagi Permesta yang berakibat kehilangan daerah pangkalan militer yang aman yakni terletak antara Mianhasa-Bolaang Mangondow. Para pasukan Permesta bercerai-berai di daerah-daerah terpencil pegunungan hingga hutan rimba (Harvey, 1989).

Keadaan tersebut membuat faktor militer menjadi semakin dominan. Perebutan senjata antara satuan-satuan pasukan yang sebagian besar dari kaum pemuda. Semakin munculnya permasalahan-permasalahan menyebabkan sebagian pemimpin atau komando pasukan menginginkan agar kembali bergabung dengan pemerintah pusat. Sadar akan

pencapaian yang mustahil dari gerakan Permesta itu dengan menciptakan pertempuran secara berkepanjangan, maka memutuskan untuk kembali ke pemerintah pusat diikuti pula oleh Kawilarang yang secara resmi kembali pada 14 April 1961. Dikeluarkanlah Kepres No. 332 pada 22 Juni tentang pemberian amnesti kepada D.J. Somba, Kawilarang dan Saerang beserta pengikutnya yang telah menerima baik seruan kembali kepangkuan ibu pertiwi (Syamsul, 1999).

Ventje menyerah tanpa syarat pada 20 Oktober 1961, ia bersama pemimpin Permesta lainnya dibawa ke pulau Jawa untuk dipenjarakan. Ventje mendekam di Rumah Tahanan Militer di Jakarta dan bebaspada tahun 1966. Setelah itu, kehidupan Ventje jauh lebih baik, ia memimpin perusahaan dan aktif di beberapa yayasan di bawah naungan Orde Baru. Ia menikmati masa-masa makmur itu hingga wafat pada 28 Maret 2010 di Jakarta dalam usia 86 tahun (Raditya, 2019).

E. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pembahasan yang telah dijelaskan maka dengan itu dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga Herman Nicolas Ventje Sumual memperoleh faktor terpenting yang menunjang keberhasilan pendidikan hingga karir militernya. Ventje berasal dari unsur kelaskaran hingga akhirnya menjadi seorang perwira militer sebelum mendirikan Permesta. Awal berdirinya permesta lahir dari tindakan penentangan terhadap rezim Sukarno yang anti demokrasi oleh para politisi, para intelektual di kalangan militer, hingga Ventje sendiri dan memiliki tujuan ingin memperbaiki kembali pembangunan daerah yang terbengkalai serta kesejahteraan rakyat. Ventje memegang peran penting dalam Permesta, ia menjadi ikon Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) setelah memproklamkan

Piagam Perjuangan Permesta pada 2 Maret 1957, Permesta kemudian berakhir pada 20 Oktober 1961.

Daftar Pustaka

- Aditjondro, G. J. (2006). "Terlalu Bugis-Sentris, Kurang" Perancis".
- Azizah, N. (2019). Islamisme: Ideologi Gerakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan 1952-1965. *Jurnal Penelitian Keislaman*, 15(2), 95-104.
- Harvey, B. S., 1989. *PERMESTA: Pemberontakan Setengah Hati*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Hasanuddin, K. X., 2016. Profil dan Sejarah. 26 Januari.
- Husain, D., 2014. *Pasukan Rimba Gorontalo Abad ke-XX*. Gorontalo: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo.
- Indonesia, T. N. P. S., 2008. *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman republik (Jilid VI)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartodirdjo, S., 1992. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900. Dari Empirium sampai Empirium Jilid I*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama .
- Leirissa, R. Z., 1997. *PRRI-PERMESTA: Strategi Membangun Indonesia Tanpa Komunis*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Nasution, A. H., 1968. *Tentara Nasional Indonesia*. Jilid II ed. Jakarta: Seruling Masa.
- Nissiel, Q. & Natalia, I. V., 2015. Sumual's Family. *Prezi*, Issue Penelitian Marga Sosiologi.

- Raditya, I. N., 2019. Permesta, Pemberontakan atau Bukan?. 14 Oktober.
- Rusiana, D., 2020. Pernah terjadi pemberontakan di Makassar oleh seorang mantan Perwira KNIL. 23 Juli.
- Sadi, H. & dkk, 2007. *Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah (GPST) di Poso 1957-1963: Perjuangan Anti Permesta dan Pembentukan Provinsi Sulawesi Tengah*. Yogyakarta: Ombak.
- Saladin, U., 2020. Komite Nasional Indonesia Pusat. 22 Juli.
- Salim, M., 1971. *Sedjarah Operasi2 Gabungan Terhadap PRRI-PERMESTA*. Jakarta: Departemen Pertahanan-Kemamanan Pusat Sedjarah ABRI.
- SB, A., 2017. *Dari Wirabuana ke Hasanuddin*. Makassar: Phinatama Media.
- Sikki, A., 1996. Pengarug Pemberontakan PRRI dan Permesta terhadap Pembangunan Nasional Indonesia. *Skripsi*, p. 47.
- Sulsel.co, R., 2016. Asrama Indonesia Merdeka: Titik Tolak Proklamasi yang Terlupakan. 22 Juli.
- Selfi, S., Ridha, R., & Malihu, L. (2020). M. Jusuf dalam Meredam Gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan 1957-1965. *PATTINGALLOANG*, 7(2), 188-199.
- Sumarkidjo, A., 2006. *Jenderal M Yusuf: Panglima Para Prajurit*. Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Sumual, H. N., 2011. *Memoar*. Jakarta: Bina Insani.
- Syamsul, 1999. *Gerakan Permesta di Sulawesi Utara (1957-1961)*. Skripsi ed. Makassar: Uiversitas Negeri Makassar.
- Triani, D., 2014. Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan: Agresi Militer Belanda II. *Scribd*.